

LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

Rapat ke : 2 (dua)
Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemkes), Direktur Jenderal (Dirjen) Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) Mabes TNI, Direktur Utama (Dirut) PT. ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan

Hari, Tanggal : Senin, 14 Januari 2019
Pukul : 12.00 WIB (didahului Makan Siang)
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Asril Hamzah Tanjung, S.I.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : Pembahasan penyelesaian payung hukum terkait pelayanan kesehatan untuk Prajurit TNI/PNS Kemhan dan keluarganya serta purnawirawan dan pembentukan gugus tugasnya.

Hadir : 1. orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Sekjen Kemenkes, diwakili oleh Kapus PJK, dr. Kolsum Komaryani, MPPM;
b. Dirjen Kuathan Kemhan, Mayjen TNI Bambang Hartawan;
c. Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, diwakili oleh Kapuskes AD, Mayjen TNI dr. Bambang Dwi Hasto, Sp.B., FinaCS., M.Si.;
d. Dirut PT. ASABRI, Letjen TNI (Purn) Sonny Widjaja;
e. Dirut BPJS Kesehatan, yang diwakili oleh:
1) Dir. Jaminan Pelayanan Kesehatan, dr. Maya Amiarny Rusady
2) Dir. Kepatuhan Hukum & HAL, dr. Bayu Wahyudi
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 13.18 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. RDP Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemkes, Dirjen Kuathan Kemhan, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung, S.I.P.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Puskes TNI, dan BPJS Kesehatan terkait laporan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 5 Desember 2018. Mengingat belum adanya perkembangan yang signifikan dari tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan sebagai *leading sector* bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan dan BPJS Kesehatan untuk:
 - a. memprioritaskan penyelesaian payung hukum terkait kekhususan rujukan berjenjang pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
 - b. sesegera mungkin membentuk dan mengaktifkan gugus tugas (*task force*) sebagai tahapan pembentukan payung hukum tersebut selambat-lambatnya hingga akhir bulan Maret 2019.
2. Komisi I DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk mengutamakan pembayaran tunggakan klaim terhadap Rumah Sakit Kemhan/TNI sesuai ketentuan yang berlaku, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kemhan/TNI.
3. Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan memasukkan substansi yang mengatur pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Jakarta, 14 Januari 2019

KETUA RAPAT,

TTD

ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.

A-340